

# POTENSI TANAMAN SAGU SEBAGAI PRODUK PANGAN LOKAL DI PROVINSI RIAU

Hardison<sup>1</sup>, Angga Pramana<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Fungsional Perencanaan, Bappedalitbang Provinsi Riau, Jl. Gajah Mada No.200,  
Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156

<sup>2</sup>Teknologi Industri Pertanian, Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang  
Baru Pekanbaru 28293.

[Hard\\_ison@yahoo.com](mailto:Hard_ison@yahoo.com) dan [pramana.angga@lecturer.unri.ac.id](mailto:pramana.angga@lecturer.unri.ac.id)

## ABSTRACT

Diversifikasi pangan non beras merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktifitas pertanian di tingkat lokal serta mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa permasalahan terkait dengan jumlah produksi tidak lagi menjadi permasalahan utama, yang menjadi fokusnya adalah bagaimana jumlah produksi yang dihasilkan bisa diserap oleh pasar (konsumen). Kemampuan dalam memasarkan produk menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan suatu kegiatan produksi. Untuk itu strategi pemasaran harus dipahami oleh masyarakat dan para pelaku usaha mikro yang bergerak disektor pengolahan sagu. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan dimulai dari bulan November hingga Februari tahun 2020. Lokasi Penelitian meliputi seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riau dan memiliki tanaman sagu serta produk turunannya. Hal ini juga menjadi wadah yang efektif untuk membuka peluang bagi masyarakat dan pihak lainnya untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan diversifikasi pangan sagu di Provinsi Riau.

**Keywords:** *diversifikasi, sagu, konsumen.*

## ABSTRAK

Non-rice food diversification is an effort to increase agricultural productivity at the local level and accelerate rural economic growth. Various studies show that issues related to the amount of production are no longer the main problem, the focus is on how the amount of production can be absorbed by the market (consumers). The ability to markets is the key to carrying out a production activity. For this reason, the marketing strategy must be understood by the public and micro businesses engaged in the sago processing sector. This research was conducted for 4 months starting from November to February 2020. The research location covers all regencies and cities in Riau Province has sago plants and their derivative products. Marketing strategies for product used internet facilities when that calls cyberspace. It also becomes an effective forum to open

opportunities for the public and other parties to be actively involved in development sago food diversification in Riau Province.

Kata Kunci : *Diversified, sago; market*

## **PENDAHULUAN**

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia dan bahkan dunia, dimana ketersediaan pangan menjadi hal penting dalam kelangusngan hidup manusia. Di Indoensia secara keseluruhan, dan Provinsi Riau khususnya pangan pokok penduduk umumnya adalah beras. Kebutuhan akan beras setiap tahun meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan semakin mebaiknya pendapatan masyarakat juga ikut meniakikan konsumsi beras.

Disisi lain, produksi beras nasional terutama di Provinsi Riau justru cenderung menurun, sebagai akibat dari tingginya alih fungsi lahan pertanian (lahan tanaman pangan) ke lahan non pangan (perkebunan, perumahan dan sebagainya). Untuk itu perlu adanya suatu solusi guna menghadapi persoalan ini, antara lian dengan melakukan diversifikasi pangan, supaya tidak hanya bertumpu pada beras saja.

Upaya diversifikasi pangan terus dilakukan pemerintah. Utnutk menggantikan fungsi beras di Indonesia terdapat setidaknya 77 komoditi yang dapat dijadikan sebagai sumber pangan alternatif , yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah sago. Kementerian Pertanian (2018), menyebutkan bahwa Indonesia memiliki luas

areal sago lebih dari empat juta hektar dan itu pula yang menjadikan Indonesia sebagai penghasil sago terbesar di dunia. Tren ekspor sago terus mengalami peningkatan, dari hanya 4.9150 ton pada tahun 2010, sudah menjadi 10.832 ton pada tahun 2016.

Dari data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau tahun 2019, Provinsi Riau merupakan salah satu produsen utama sago di Indonesia, dimana terdapat seluas 82.713 ha, yang terdiri dari 20.200 ha milik perusahaan dan 60.513 ha milik masyarakat, dengan produksi tepung pada tahun 2017 tercatat sebesar 326.725 ton.

Tahun 2016 Provinsi Riau mencanangkan sago sebagai salah satu produk unggulan daerah, dengan pencanangan “Sagu Menyapa Dunia”, dimana pada saat yang sama telah mendapat penghargaan dari MURI, dengan tercatatnya sebanyak 369 jenis produk olahan berbahan baku sago.

### **Rumusan Masalah**

1. Perkembangan indikator makro pembangunan provinsi riau?
2. Bagaimana Potensi Sagu di Riau?
3. Bagaimana tentang cost dan manfaat sago?
4. Bagaimana Peran Pemerintah Provinsi Riau?

## **Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan indicator makro pembangunan Provinsi Riau
2. Untuk mengetahui Potensi Sagu di Riau
3. Untuk mengetahui cots dan manfaat sagu
4. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Provinsi Riau

## **METODE PENELITIAN**

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua belas) bulan yaitu mulai dari bulan Desember 2019 sampai dengan Februari 2020 dengan mengambil data yang ada dan sumber lainnya

### **Metode Penentuan Sampel**

Metode lakukan dengan metode survey, wawancara, observasi dan dokumentasi obyek-obyek penelitian (Singarimbun, 1983). Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian meliputi, data umum responden, informasi produk (bahan baku dan cara pengolahan), serta tingkat higienitas pengolahan (penerapan tata cara proses produksi makanan yang baik), serta pengembangan produk (Inovasi produk olahan pangan).

Teknis pengumpulan data penelitian adalah, setiap responden diwawancarai untuk satu produk pangan olahan lokal. Data sekunder dikumpulkan dari laporan kegiatan ilmiah, dokumen-dokumen yang terkait dengan pangan olahan lokal di Provinsi Riau, sumber ini dapat diperoleh dari dinas, instansi atau institusi yang terkait yang menjalankan berbagai bentuk kegiatan/program ketahanan pangan berkelanjutan, penanggulangan masalah gizi, pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian pangan, peningkatan nilai tambah produk dan pengembangan produk turunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Menurut (Kadariah, 1999) tentang biaya (cost) dan manfaat (benefit) :

#### 1. Biaya (cost)

Biaya dalam proyek dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu :

a. Biaya Persiapan, yaitu biaya yang dikeluarkan sebelum proyek yang bersangkutan benar-benar dilaksanakan, misalnya biaya studi kelayakan pada lahan yang digunakan untuk proyek termasuk di dalamnya studi kelayakan pada daerah dan masyarakat sekitarnya dan biaya untuk mempersiapkan lahan yang digunakan.

b. Biaya Investasi atau Modal, yaitu biaya yang biasanya didapat dari pinjaman suatu badan atau lembaga keuangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang termasuk dalam biaya investasi adalah biaya tanah, biaya pembangunan termasuk instalasi, biaya perabotan, biaya peralatan (modal kerja).

c. Biaya Operasional, yaitu biaya untuk gaji karyawan, biaya listrik, air dan komunikasi, biaya habis pakai, biaya kebersihan, dan sebagainya.

d. Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan, yaitu biaya yang muncul setelah proyek memasuki usia tertentu akibat dari adanya kerusakan-kerusakan yang memerlukan perbaikan, sehingga jenis biaya ini sering dijadikan data dengan biaya operasional.

Selain yang diatas, masih ada biaya yang mencerminkan true values tetapi sulit untuk dihitung dengan uang, seperti pencemaran udara, air, suara, rusak/tidak produktifnya lagi lahan, dan sebagainya.

## 2. Manfaat (Benefit)

Manfaat yang dapat diperoleh sebagai akibat dari adanya kegiatan proyek, dapat dibagi dalam tiga manfaat yaitu :

### a. Manfaat Langsung

Manfaat langsung dapat berupa peningkatan output secara kualitatif dan kuantitatif, penggunaan alat produksi, penggunaan teknologi dan berbagai keterampilan menghasilkan produk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas.

### b. Manfaat Tidak Langsung

Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang muncul diluar dari tujuan kegiatan proyek, berbagai kegiatan dalam proyek dapat menghasilkan manfaat yang lain seiring dengan dilaksanakannya suatu kegiatan proyek, manfaat ini dapat berupa meningkatnya pendapatan masyarakat disekitar lokasi proyek (sulit diukur).

### c. Manfaat Terkait

Manfaat terkait yaitu keuntungan-keuntungan yang timbul sebagai dampak dari kegiatan proyek dan tidak selalu berkaitan dengan keuntungan materi saja, namun bisa dirasakan manfaat lainnya oleh masyarakat misalnya keamanan dan kenyamanan sekitar proyek.

Penelitian ini menggunakan metode analisis biaya dan manfaat pada suatu kegiatan dengan menganalisis dua aliran kas, yaitu aliran kas keluar (*cash outflow*) dan aliran kas masuk (*cash inflow*) dan metode analisis perbandingan pendapatan perkapita dengan pengeluaran perkapita. Untuk aliran kas masuk sering dihubungkan dengan proses, yaitu keuntungan bersih sesudah pajak ditambah dengan depresiasi. Adapun metodenya terdiri dari :

### 1. Payback Period (PP)

*Payback Period* adalah suatu periode penutupan kembali pengeluaran biaya /nilai investasi dengan menggunakan aliran kas. Perhitungannya :

$$\text{Payback periode} = \frac{\text{nilai investasi}}{\text{cash inflow}} \times 12 \text{ bulan}$$

Kriteria penilaian :

a. Jika payback period lebih pendek waktunya dibanding dengan maximum payback period maka usulan investasi dapat diterima atau dilanjutkan.

b. Jika payback period lebih panjang waktunya daripada maximum payback period maka usulan investasi tidak dapat diterima atau tidak perlu dilanjutkan.

## 2. Net Present Value (NPV)

Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang (present value) dari investasi sekarang dengan penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Dalam perhitungan ini memerlukan tingkat bunga yang relevan. NPV merupakan net benefit yang telah didiskon dengan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor.

Perhitungannya :

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{Bt - Ct}{(1 + i)^t}$$

Dimana :  $R/C \text{ ratio} = \frac{\text{revenue}}{\text{total biaya (tetap+variabel)}}$

Bt : Benefit Social Bruto proyek pada tahun t

Ct : Cost Social Bruto proyek pada tahun t

t : Tahun

n : Umur ekonomis proyek

i : Social Opportunity Cost of Capital yang digunakan sebagai social discount rate.

Kriteria penilaian :

a. Jika  $NPV \geq 0$ , maka usulan proyek diterima.

b. Jika  $NPV < 0$ , maka usulan proyek ditolak.

## 3. Internal Rate of Return (IRR)

Metode ini mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa datang, atau penerimaan kas, dengan pengeluaran investasi awal.

Perhitungannya :

$$IRR = i_1 + \frac{NPV_1}{NPV_1 - NPV_2} \cdot (i_2 - i_1)$$

Kriteria penilaiannya :

a. Jika  $IRR \geq i$ , maka nilai  $NPV = 0$ , artinya proyek dapat dilaksanakan dan dilanjutkan.

b. Jika  $IRR < i$ , maka proyek tersebut tidak dapat dilaksanakan.

## 4. Revenue-Cost (R/C ratio)

Revenue-Cost atau R/C adalah jumlah rasio yang dipakai untuk memprediksi keuntungan relatif yang diperoleh pada sebuah proyek atau sebuah kegiatan usaha. Maksudnya adalah kegiatan usaha atau sebuah proyek dikatakan layak jika nilai R/C yang diperoleh tersebut dinyatakan lebih besar dari 1. Maksudnya adalah jika nilai R/C semakin tinggi, maka tingkat keuntungan yang diperoleh juga menjadi lebih tinggi.

Penggunaan R/C ratio ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang diperoleh dari usaha yang menguntungkan pada periode tertentu.

Perhitungannya :

Kriteria penilaiannya :

a. Jika  $R/C > 1$ , maka proyek/usaha akan dinyatakan untung

a. Jika  $R/C < 1$ , maka proyek/usaha akan dinyatakan merugi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU

Perkembangan indikator makro pembangunan Riau, dirasa sangat perlu disampaikan/diinformasikan kepada

mahasiswa, supaya mereka memahami perkembangan hasil-hasil pembangunan saat ini di Provinsi Riau. Apalagi mahasiswa fakultas Pertanian, sangat jarang memperoleh informasi tentang indikator makro pembangunan ini.

Beberapa Indikator Makro yang dijadikan indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah, yaitu Pertumbuhan ekonomi, Perkembangan PDRB, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini (Gini Ratio), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Capaian masing-masing indikator selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat disampaikan sebagai berikut :

#### 1. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dari data yang ada dalam kurun 2015 – 2018, adalah situasi dimana ekonomi Riau berada dalam kondisi terparah., dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Riau hanya 0,22%, secara berangsur naik menjadi 2,23 % pada Tahun 2016, dan 2,68 % pada Tahun 2017 dan kembali turun menjadi 2,34 % pada Tahun 2018. Sementara kalau dibandingkan dengan nasional, pertumbuhan ekonominya pertumbuhan diatas 5 %, pertumbuhan ekonomi Sumatera juga terus meningkat, dari 3,54 % tahun 2015 menjadi 4,72% tahun 2018, sehingga pertumbuhan ekonomi Riau dalam

5 (lima) tahun terakhir ini berada dibawah rata-rata Sumatera dan rata-rata Nasional.

Sumber pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2018 adalah sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan. Terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir ini, disebabkan; (1) adanya kebijakan Amerika menurunkan defisit perdagangan, berdampak melemahnya perdagangan dunia, (2) penurunan produksi dan melemahnya harga minyak bumi pada triwulan IV 2018, (3) penurunan harga komoditas utama Riau (kelapa sawit dan karet), (4) penurunan produksi kayu, akibat HTI tidak boleh menanam kembali di lahan gambut.

Kaitan dengan hal itu, maka pengembangan kawasan industri menjadi suatu hal yang mutlak dan harus dilakukan di Riau, jika tidak maka jangan diharap pertumbuhan ekonomi Riau akan baik dimasa yang akan datang. Karena jika Riau hanya menghasilkan Minyak Sawit (CPO) atau Karet kering, nilai tambah bagi masyarakat dan daerah hanya kecil dan tidak berarti.

#### 2. **Perkembangan PDRB**

PDRB Provinsi Riau atas dasar harga berlaku Tahun 2018, menduduki peringkat ke-5 secara nasional, dan terbesar di Luar Pulau Jawa, yaitu sebesar 755,27 Triliyun rupiah

Kontribusi terbesar dari PDRB Riau adalah bersumber dari sektor (1) pertambangan dan penggalian (Migas), (2) Sektor pertanian dan

Kehutanan, serta (3) Sektor Industri pengolahan.

### **3. Tingkat kemiskinan**

Indikator pembangunan lainnya, yaitu kemiskinan, dimana angka kemiskinan di Provinsi Riau sejak 5 (lima) tahun terakhir yaitu 2015-2018 menunjukkan trend penurunan, dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar 8,82% menurun menjadi 7,21% pada tahun 2018.

Tentunya ini merupakan suatu keberhasilan dari suatu pembangunan pada suatu wilayah. Apalagi jika dibandingkan dengan rata-rata Sumatera dan Nasional, maka persentase penduduk miskin di Provinsi Riau jauh lebih baik. Pada tahun 2015 rata-rata Sumatera sebesar 10,76 sedangkan nasional 11,13%, sementara pada tahun 2018 rata-rata Sumatera sebesar 10,15% dan rata-rata nasional sebesar 9,82%.

Dari sisi jumlah penduduk miskin juga terjadi penurunan, dimana pada tahun 2017 sebesar 514.620 jiwa menurun menjadi 494.260 Jiwa tahun 2018.

### **4. Indek Pembangunan Manusia (IPM)**

Indek Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasi apakah suatu Negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

IPM memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya, yaitu 1) umur panjang dan hidup sehat, yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran, 2) pengetahuan, yang dihitung dari angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, dan 3) standar hidup yang layak, yang dihitung dari PDB atau keseimbangan kemampuan berbelanja per-kapita atau pengeluaran per-kapita.

IPM Provinsi Riau sejak 4 (empat) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari 70,33 pada tahun 2014, meningkat menjadi 71,79 pada tahun 2017. IPM Provinsi Riau juga berada diatas rata-rata IPM nasional, dimana tahun 2014 rata-rata IPM nasional hanya 68,90 dan tahun 2017 sebesar 70,99. Secara keseluruhan IPM Provinsi Riau merupakan IPM tertinggi ke-6 Se Indonesia dan berada diatas rata-rata nasional.

### **5. Indek Gini atau Gini Ratio**

Indek Gini merupakan alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk, yang angka berkisar antara nol (pemerataan sempurna) dan 1 (Satu) (ketimpangan yang sempurna)

Pencapaian Indek Gini Provinsi Riau Tahun 2018 sebesar 0,325, dimana ini termasuk kategori relative merata.

Dibandingkan dengan Indek Gini nasional (0,39), Indek Gini Provinsi Riau lebih baik.

### **6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menunjukkan hasil yang baik, dimana selama kurun 4 (empat) tahun

terakhir persentase TPT di Provinsi Riau terus menurun, tahun 2015 TPT sebesar 7,83% berada diatas nasional yang sebesar 6,18%.

Kondisi terus menurun menjadi 6,20% pada tahun 2018 dan kondisi TPT ini masih berada diatas nasional sebesar 5,34%. Tingkat partisipasi angkatan kerja Tahun 2018 sebesar 68,23%, dengan jumlah pengangguran sebesar 192.800 jiwa. Pengembangan kawasan industri ini adalah bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Riau untuk memperluas lapangan kerja bagi masyarakat Riau.

#### B. KONDISI SAGU DI PROVINSI RIAU

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi penghasil utama sagu di Indonesia, dimana di provinsi Riau terdapat pertanaman Sagu seluas 74. 157 Ha, yang terdiri dari milik masyarakat seluas 62.257 ha, dengan rincian Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 20.014 Ha, Tanaman Menghasilkan seluas 38.180 Ha, dan Tanaman Tua Rusak (TTR) seluas 4.063 Ha, serta terdapat seluas 11.900 Ha tanaman milik Perusahaan Besar Swasta. Total Produksi tahun 2018 tercatat sebanyak 364.233 ton, dengan rata-rata produksi sebesar 7.273 ton/Ha/tahun, untuk jelasnya sebagaimana tertera pada Tabel 1 dibawah ini.

No	Kabupaten	Luas Pertanaman				PRODUKSI (ton)
		TBM	TM	TTR	TOTAL	
1	Pelalawan	30	343	405	779	917
2	Bengkalis	1.53	1.557	50	3.137	2.164
3	Siak	471	254	8	733	344
4	Indragiri Hilir	4.592	9.772	3.6	17.964	13.488
5	Kep. Meranti	13.39	26.254	-	39.644	239.086
<b>Milik Rakyat</b>		<b>20.01</b>	<b>38.18</b>	<b>4.063</b>	<b>62.26</b>	<b>255.999</b>
<b>Milik PBS</b>		<b>-</b>	<b>11.9</b>	<b>-</b>	<b>11.9</b>	<b>108.234</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20.01</b>	<b>50.08</b>	<b>4.063</b>	<b>74.16</b>	<b>364.233</b>

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Tahun 2020

Keterangan : TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TTR : Tanaman Tua Rusak

Dari tabel 1 diatas terlihat bahwa dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau, pertanaman sagu hanya terdapat pada 5 (lima) kabupaten, yaitu Pelalawan, Bengkalis, Siak, Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti, dimana kelima kabupaten ini merupakan kabupaten yang terletak di wilayah pesisir, yang identik dengan daerah rawa dan bergambut, dimana merupakan ekologi yang sangat sesuai untuk pertumbuhan tanaman sagu. Dari 5 (lima) kabupaten tersebut pertanaman sagu terluas terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga kabupaten ini merupakan sentra produksi sagu di Riau bahkan Indonesia. Sagu sudah menjadi sumber perekonomian penduduk di Kepulauan Meranti, dimana juga terdapat bbanyak pabrik pengolahan sagu menjadi tepung sagu.

### C. ANALISIS COST DAN MANFAAT

Pemerintah dan ketersediaan perkebunan sagu yang ada, maka dalam penelitian ini juga melihat nilai manfaat secara ekonomi yang didapat oleh petani sagu. Pohon sagu yang dimiliki petani bernilai ekonomis yang tinggi. Satu batang pohon sagu bisa dibagi menjadi 7 - 8 potongan yang biasa di sebut sebagai tual. Tual memiliki ukuran lebih kurang 110 cm. Dalam satu hektar, masyarakat secara tradisional membaginya menjadi 3 jalur dimana dalam satu jalur terdapat lebih kurang 40 batang pohon sagu, sehingga dalam satu hektar rata rata terdapat 120 batang sagu.

Dengan asumsi setiap batang menghasilkan 8 tual, maka dalam satu hektar dapat menghasilkan 960 tual. Pada saat penelitian ini dilakukan, harga jual untuk satu tual sagu adalah Rp40.000, maka dalam satu tahun petani sagu akan memperoleh pendapatan kotor sebesar Rp38.400.000. Hasil penjualan ini masih harus dikurangi dengan biaya variabel berupa upah tebang dan upah angkut menuju kilang sagu. Untuk upah tebang dan biaya angkut menghabiskan dana sebesar Rp12.000 per tual. Dengan demikian total biaya variabel per hektar adalah sebesar Rp11.520.000 sehingga pendapatan bersih petani setelah biaya variabel adalah sebesar Rp26.880.000 per tahun.

Tabel Pendapatan Masyarakat Usaha Perkebunan

Keterangan	Satuan	Rp.
Harga	Per Tual	40
Produksi	120 Batang per Jalur x 8 Tual (per Ha)	960
Penerimaan		38.400.000
Biaya		11.520.000
Upah Tebang dan Angkut ke Kilang	Per Tual Rp. 12.000	11.520.000
Pendapatan Bersih		26.880.000

Sumber : Diolah dari survei lapangan, 2018

Tabel Hasil Analisis Kelayakan Usaha Perkebunan Sagu

No	Uraian	Hasil
1	Payback Period	12 Tahun
2	R/C	2,56
3	NPV	0,73
4	IRR	18,26%

Sumber : Diolah dari survei lapangan, 2018

Payback Period perkebunan sagu adalah 12 tahun, hal ini sangat wajar karena mengingkat sagu merupakan tanaman yang butuh waktu untuk tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan sagu dan perhitungan nilai ekonominya bersifat time series.

Nilai R/C kebun sagu adalah 2,56, dimana nilai tersebut lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa yang dengan memiliki kebun sagu, masyarakat mendapatkan keuntungan.

Dengan memperhitungkan tingkat bunga pinjaman/kredit (i) saat penelitian

berlangsung, yaitu 14%, maka selisih antara nilai sekarang (present value) dari investasi sekarang dengan penerimaan kas bersih di masa yang akan datang (NPV) adalah 0,73. Angka ini menunjukkan bahwa kegiatan perkebunan sagu masih dapat terus dapat dilakukan karena mendatangkan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat.

Nilai IRR pada penelitian ini adalah 18,26 %, lebih besar dari tingkat bunga (i) yaitu 14%. Oleh sebab itu kegiatan perkebunan masih dapat dilanjutkan karena penerimaan/revenue dimasa datang akan lebih besar.

#### **D. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SAGU DI RIAU.**

Visi, Misi dan Arah Kebijakan

Sejalan dengan Visi Gubernur Riau yang sudah ditetapkan “ Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia ( RIAU BERSATU)”. dan Misinya, adalah :

1. Newujudkan sumberdaya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya
2. Mewujudkan pembangunan infratsruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing
4. Mewujudkan budaya melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing
5. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Adapun arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024, adalah sebagaimana tertera pada gambar dibawah ini.



Gambar 1 : Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Riau tahun 2020 – 2024

Dari gambar diatas terlihat bahwa untuk 5 (lima) Tahun RPJMD Provinsi Riau telah ditetapkan arah dan kebijakan pembangunan.

Pada Tahun Pertama (2020); arah pembangunan Riau lebih menitikberatkan pada pembangunan sumberdaya manusia, infrastruktur wilayah, pengembangan industri, pertanian dan pariwisata berbasis budaya melayu.

Pada Tahun Kedua (2021); menitikberatkan pada pengembangan industri, pertanian, pariwisata yang mendorong perdagangan dan jasa untuk meningkatkan daya saing ekonomi

Pada Tahun ketiga (2022); Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis industri, pertanian dan pariwisata dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima.

Pada tahun Keempat (2023); Memantapkan kesejahteraan masyarakat , pelayanan publik dan daya saing daerah yang kompetitif.

Pada Tahun Kelima (2024); Mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia.

Sejalan dengan Visi dan Misi serta arah kebijakan selama lima tahun kedepan, maka salah satu komoditas yang kan dikembangkan dalam rangka menopang perekonomian di Riau kedepan adalah pengembangan komoditas sagu. Berbagai upaya yang telah dan akan terus dilakukan dalam rangka pengembangan komoditas sagu di Provinsi Riau adalah :

1. Membangun sinergitas (pusat-provinsi-kabupaten) dengan dukungan dana APBN dan APBD Provinsi serta APBD Kabupaten
2. Sudah memiliki benih unggul bersertifikat
3. Setiap tahun dilakukan penambahan areal tanam
4. Mengembangkan tehnologi pangan local
5. Sosialisasi dan promosi “Riau Provinsi sagu, dan Sagu Menyapa Dunia”
6. Gerakan Cinta Sagu

### **Pola Pengembangan**

Untuk kedepan akan dikembangkan suatu MODEL dalam rangka pengembangan kluster Inovasi Prproduk Unggulan Daerah, sebagaimana digambarkan dibawah ini.



Gambar 2. Model Pengembangan Kluster Inovasi Produk Unggulan Daerah Sagu di Provinsi Riau

Dalam model ini, dapat dijelaskan bahwa ada 4 (empat) pihak yang terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah “sagu” ini, yaitu :

1. Government; dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Riau, yaitu beberapa Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Lembaga lainnya sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya masing-masing, yang terkait dalam hal ini adalah Badan Litbang Provinsi Riau, LIPI, Bappeda provinsi Riau, Dinas yang membidangi Pertanian dan Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan, Perindustrian dan Perdagangan, Pekerjaan Umum, Koperasi dan UKM, serta instansi terkait lainnya baik di Provinsi maupun di kabupaten.
2. Acedemic; yaitu perguruan tinggi yang ada di Riau dan diluar Riau, diharapkan sinberginya dlam hal pengkajian, penelitian, yang termasuk adalah Universitas Riau, Universitas Islam Riau, Politeknis Caltex Riau, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gajahmada.

3. Bussiness; yang terkait dengan ini adalah semua lembaga yang akan bergerak dibidang bussines dalam arti luas, terutama pemasaran dan pengembangan produk, yaitu KADIN, lembaga perbankan, dan perusahaan yang selama ini sudah bergerak di bidang sagu.

4. Community; yaitu para petani sagu, pengusaha kilang sagu, pengarjin agroindustry sagu, mies sagu, gula sagu, dan kelompok masyarakat lainnya.

## KESIMPULAN

Akselerasi diversifikasi pangan sagu dalam peningkatan kesejahteraan petani sagu di Provinsi Riau perlu dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya oleh pemerintah namun juga dapat bekerjasama dengan masyarakat dan pihak lainnya. Potensi yang sangat besar dalam pengembangan sagu hendaknya menjadi focus pengembangan pangan di Provinsi Riau. Berbagai strategi untuk pengembangan diversifikasi pangan sagu dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan baku sagu untuk mengembangkan berbagai produk hilir yang dapat menstimulus berkembangnya berbagai variasi produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain itu sejalan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau sejalan Membangun sinergitas (pusat-provinsi-kabupaten) dengan dukungan dana APBN dan APBD Provinsi serta APBD Kabupaten Sudah memiliki benih unggul bersertifikat, Setiap tahun dilakukan penambahan areal tanam, Mengembangkan tehnologi pangan

local, Sosialisasi dan promosi “Riau Provinsi sagu, dan Sagu Menyapa Dunia”, dan Gerakan Cinta Sagu sehingga wadah yang efektif untuk membuka peluang bagi masyarakat dan pihak lainnya untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan diversifikasi pangan sagu di Provinsi Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Abdurrachman. 2006. Strategi Mempertahankan Multifungsi Pertanian di Indonesia. Balai penelitian tanah. Jurnal. penelitian dan pengembangan pertanian Volume 25 nomor 5.
- Assauri, Sofyan. 2004. Manajemen Produksi dan Operasi. Edisi Revisi Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bengkalis Dalam Angka, 2019.
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2019
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka, 2019. <https://merantikab.bps.go.id/publication/>.
- Badan Pusat Statistik, Riau Dalam Angka, 2019
- David, F. R. 2004. Manajemen Strategis : Konsep. Edisi Ketujuh. Prenhallindo. Jakarta.
- Fathoni, M.I. 2016. Analisis Usaha Industri Jenang Krasikan di Kabupaten Sukoharjo. Skripsi. Program Studi Agribisnis. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Ferrel,O.C and D, Harline. 2005. Marketing Strategy. Thomson Corporation. South Western.

Kadariah, 1999. Evaluasi Proyek Analisis Ekonomi. Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.

Machfoedz Mahmud, 2005. Pengantar Pemasaran Modern. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2002. Manajemen Perbankan. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Mulyadi, 1999. Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Salemba Empat. Jakarta

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2020